

**ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA
LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B
TEBING TINGGI**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**ARMANDO WIJAYA NASUTION
NPM : 71210123169**

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

**ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA
LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B
TEBING TINGGI**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**ARMANDO WIJAYA NASUTION
NPM : 71210123169**

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Medan, November 2023

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN) (Dr. Mukidi, SE., SH., M.H)

ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B TEBING TINGGI

Armando Wijaya Nasution*
Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN**
Dr. Mukidi, SE., SH., M.H***

ABSTRAK

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi dilakukan atau diusulkan di sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi dan hasil sidang tersebut diusulkan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selanjutnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat surat keputusan remisi narapidana. Dasar pemberian remisi pada narapidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum pemberian remisi pada narapidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi, bagaimana pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi, apakah kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani adalah narapidana melakukan tindakan indisipliner dan narapidana yang yang masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana, Narkotika Dan Psikotropika

* Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**JURIDICAL ASPECTS OF THE PROGRAM FOR PROVIDING
REMISSIONS FOR NARCOTICS AND PSYCHOTROPIC
PRISONERS INCLASS II B COMMUNITY
INSTITUTION HIGH CLIFF**

Armando Wijaya Nasution*
Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN**
Dr. Mukidi, SE., SH., M.H***

ABSTRACT

Remission is a reduction in the period of serving a sentence given to prisoners who meet the requirements specified in statutory regulations. The implementation of remission for narcotics and psychotropic substances convicts at the Class II B Penitentiary Institution in Tebing Tinggi is carried out or proposed at a TPP (Correctional Observer Team) session or officials of the Class II B Penitentiary Institution in Tebing Tinggi and the results of the trial are proposed to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Next, the Directorate General of Corrections makes a decision on the prisoner's remission. The basis for granting remission to narcotics and psychotropic substances prisoners at the Class II A Binjai Penitentiary is Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Government Regulation Number 99 of 2012 concerning Amendments to Government Regulation No. 32 of 1999 concerning Requirements and Procedures for the Implementation of the Rights of Inmates Correctional.

The formulation of the problem in this thesis is how the legal regulation of granting remissions to narcotics and psychotropic substances prisoners at the Tebing Tinggi Class II B Correctional Institution, how implementation of remission for narcotics and psychotropic substances prisoners at the Class II B Tebing Tinggi Penitentiary, what are the obstacles in granting remissions for convicts convicted of narcotics and psychotropic substances at the Class II B Tebing Tinggi Penitentiary who are not given remission for sentences already served?

This type of research is normative juridical and empirical. This writing is descriptive analytical in nature which leads to empirical juridical research. The data collection tools are document studies and field research, namely by conducting research at the Tebing Tinggi Class II B Correctional Institution.

Based on the results of the research, it is known that the obstacles in granting remission to convicts who have committed narcotics and psychotropic crimes at the Binjai Class II Penitentiary who are not given remission for sentences that have been served are inmates who commit disciplinary actions and inmates who are still serving their criminal term which is a condition of the provisions. remission.

Keywords: *Remission, Prisoners, Narcotics and Psychotropics*

*Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.

**Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra

***Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **"Aspek Yuridis Program Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi"**. Tesis ini dimaksudkan untuk untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Danialsyah, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, SH, MS.CN selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu
3. Bapak Dr. Mukidi, SE, S.H.,M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

4. Seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuannya kepada penulis.
5. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini, Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis;
6. Keluarga penulis dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa rabbal'alamin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, November 2023
Penulis

Armando Wijaya Nasution

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konsep	7
1. Kerangka Teori.....	7
2. Kerangka Konseptual.....	22
E. Asumsi	23
F. Keaslian Penelitian	24
G. Metode Penelitian	26
1. Sifat Penelitian	27
2. Metode Pendekatan	28
3. Tenik Pengumpulan Data.....	28
4. Analisis Data	30
BAB II : PENGATURAN HUKUM PEMBERIAN REMISI PADA NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TEBING TINGGI.....	31
A. Tinjauan Tentang Remisi.....	31
1. Pengertian Remisi	31
2. Syarat Pemberian Remisi.....	34
3. Pengaturan Hukum Pemberian Remisi	35
B. Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan dan Lembaga Permasyarakatan.....	38
1. Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan	38
2. Lembaga Pemasyarakatan	43

C. Dasar Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi.....	47
1. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.....	47
2. Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narapidana Narkotika dan Psikotropika	62
BAB III : PELAKSANAAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TEBING TINGGI.....	75
A. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi.....	75
B. Pelaksanaan Remisi Terhadap Narapidana Narkotika dan Psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi.....	81
C. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim	76
D. Kebijakan Hukum Pidana dalam Disparitas Penyalahgunaan Narkotika.....	80
BAB IV : KENDALA-KENDALA PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TEBING TINGGI YANG TIDAK DIBERIKAN REMISI ATAS VONIS HUKUMAN YANG TELAH DIJALANI.....	106
A. Hambatan Pemberian Remisi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi.....	106
B. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi	111
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alatas, Husein, *Penanggulangan Korban Narkotika*. FKUI. Jakarta, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Anwar, Yesmil, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung., 2012.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- ; *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- ; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Aryadi, Gregorius, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, UAJY, Yogyakarta, 2015.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 2018.
- Asmarawati, Tina, *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP*, Budi Utama, Yogyakarta, 2014
- Asya, F, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2019
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2012.
- A.W. Wijaya, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 2015
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Dellyana, Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018.
- D. Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2017.

- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Firmanzah dkk. *Mengatasi Narkotika Dengan Welas Asih*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017.
- Handoyo, Ida Listryarini, *Narkotika Perlukan Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta, 2014.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- Hasibuan, Abdurrozaq, *Metodologi Penelitian*, Nurinsani, Medan, 2013.
- Harifin, A. Tumpa, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, FH. Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018.
- Kabain, Achmad, *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelematkan Anak dari Pengaruh Napza*, Bengawan Ilmu, Semarang, 2010
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Lubis, M.Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju Bandung 2004.
- Makarto, Muh. Taufik dkk, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Mappaseng, Erwin, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan Oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Surabaya, Buana Ilmu, 2012
- Ma'roef, M. Ridha, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaya, Jakarta, 2016.

- Martono, Lydia Harlina dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Mansar, Adi, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013
- Muljono, Wahju, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- Nadack, Wison, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 2013.
- Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta, 2014.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008
- Rahayu, Yusti Probawati *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Citra Media, Sidoarjo, 2015.
- Ravena, Dey dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017
- Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung, 2014.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010.
- Salman, HR Otje, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2012.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 2013.

Simatupang, Nursariani dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017

Siswanto, HS. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2019.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2016.

-----; *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012.

-----; *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017.

Supramono, Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2014

Sunarsono, Siswanto, *Politik Hukum dalam UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

-----; *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

Susanto, IS. *Kriminologi, Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Syamsuddin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Widharto, *Stop Mirasantika*, Sunda Kelapa Pustaka, Jakarta, 2017.

Wilis, Sofyan S. *Perundangan Narkotika*, Pustaka Yusticia, Jakarta, 2014.

Wuismen, JJ M. *Penelitian Ilmu Sosial*, Jilid 1, Penyunting M. Hisman, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.

Zakky, Moh. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.

B. Jurnal

Achjani, Eva. "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41*, Vol.1 No. 2 (2019).

Putri, Ni Putu Yulia Damar, dan Sagung Putri ME Purwani. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No.8 (2019)

Priyanto, A., "Citra Hakim dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, (2015).

Resnawardhani, Fitri. "Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lentera Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2019).

C. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 2009-keempat 2002).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan,

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-21.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurangan Hukuman Secara Khusus Pada peringatan Tujuh Puluh Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS-PK.01.01.02-395 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penerbitan Surat Keputusan Remisi Dasawarsa Tahun 2015

Surat Edaran Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan nomor PAS-PK.01.01.02-987 Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Penerbitan Surat Keputusan Remisi Dasawarsa Tahun 2015.